

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di zaman sekarang, performa perusahaan dapat dinilai baik atau buruk melalui kondisi laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki fungsi sebagai alat untuk membagikan informasi kepada pihak – pihak eksternal yang berhubungan. Laporan keuangan juga digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak eksternal dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Laporan keuangan yang baik pada umumnya memiliki karakteristik yang cenderung dapat dipahami, relevan, dan memiliki keandalan dalam penyajian material oleh manajemen perusahaan. Laporan keuangan sendiri merupakan rangkuman terperinci dalam pencatatan diatas transaksi keuangan yang sudah berlangsung pada tahun berjalan. Berdasarkan PSAK no. 1 tahun 2019, laporan keuangan yang baik harus dapat membahas mengenai aspek-aspek seperti kewajaran penyajian, kepatuhan terhadap standar akuntansi, *going concern*, konsistensi, dan ketepatan materialitas.

Laporan keuangan dapat dinilai baik tidak terlepas dari hasil kualitas audit yang juga baik. Dimana hasil kualitas audit tersebut juga mempengaruhi kualitas auditor yang bersangkutan, yang di dalamnya terkandung kejelasan informasi hasil pemeriksaan yang sesuai dengan standar-standar audit yang berlaku atas laporan keuangan tersebut yang dilakukan oleh auditor.

Menurut Damayanti dan Susanto (2015), kualitas audit didefinisikan sebagai semua probabilitas yang bisa terjadi pada saat auditor melakukan kewajiban dalam melakukan tugas audit atas laporan keuangan milik klien dan menemukan sebuah pelanggaran dan melaporkan dalam laporan keuangan auditan. Kualitas audit sendiri merupakan sesuatu yang tidak dapat diukur dengan akurat dan merupakan sebuah konsep yang bersifat subjektif. (Siregar dan Agustini, 2020). Namun, dengan penggunaan proksi *discretionary accrual* dapat digunakan untuk membantu auditor dalam mendeteksi potensi adanya manajemen laba dalam suatu perusahaan.

Manajemen laba adalah sebuah perilaku dimana pihak internal perusahaan melakukan perubahan informasi laporan keuangan untuk memanipulasi kondisi perusahaan di depan *stakeholders*. Salah satu contoh kasus pada perusahaan manufaktur adalah PT Kimia Farma Tbk. Terdapat peristiwa pengembungan laba bersih pada laporan keuangan Kimia Farma. Kasus ini menyeret pihak KAP yang mengaudit laporan keuangan Kimia Farma, dan sudah dibuktikan bahwa KAP tidak membantu manajemen untuk melakukan kecurangan dan gagal mendeteksi kecurangan. Bukti kesalahan yang ditemukan yaitu kesalahan penyajian laporan keuangan mengakibatkan overstated laba pada laba bersih sebesar Rp 32,7 Miliar, yang merupakan 2,3% dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih PT Kimia Farma.

Terdapat juga kasus terkait yang terjadi di Indonesia mengenai pelanggaran penyajian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) memanipulasi laporan keuangan perusahaan pada tahun 2017 yang melakukan

rekayasa pada piutang usaha, persediaan, penjualan, dan aset tetap (www.investor.id). Manajemen internal perusahaan dapat mengetahui dan menjadikan laba dalam laporan keuangan tersebut sebagai parameter dalam menilai seberapa tinggi kualitas audit yang dihasilkan. Kualitas laporan keuangan suatu perusahaan memang dinilai menjadi peranan penting bagi banyak pihak dalam melihat laporan keuangan. Berdasarkan prinsip *reliability*, kualitas laporan keuangan dapat ditunjukkan dan menjadi salah satu indikator yang harus dipenuhi dalam menilai sebuah laporan keuangan (Kieso, 1995).

Dengan munculnya semakin banyak kasus mengenai skandal laporan keuangan di Indonesia, *stakeholder* pun menjadi meragukan tentang makna kualitas audit itu sendiri. Tentunya kualitas audit selalu menjadi pedoman bagi para pengguna jasa audit atau para pemegang saham yang selalu berharap agar perusahaan mereka terbebas dari kesalahan salah saji material, baik itu disebabkan secara sengaja maupun tidak sengaja. Selain itu, kualitas audit juga dipengaruhi oleh independensi dari auditor yang bersangkutan. Memiliki auditor yang independen juga bisa dipastikan bahwa auditor bisa menjaga hubungan baik antar klien maupun KAP yang di audit. Tentunya dengan memberikan *feedback* kepada perusahaan atas kontribusi yang dilakukan selama masa periode. Auditor nantinya juga harus bisa mengembalikan maupun mempertahankan kepercayaan para pemegang saham perusahaan dari kualitas audit yang dihasilkan.

Menurut Hartadi (2012), dalam melaksanakan proses audit, seorang auditor harus memiliki kemampuan teknis yang terpresentasi lewat pengalaman ataupun profesi dalam menjaga kualitas nya dengan menerapkan sikap independensi dalam

mental. Dengan adanya prinsip tersebut, auditor juga perlu mengingat bahwa di dalam proses audit, diperlukan memperhatikan banyak faktor, salah satunya dengan memperhatikan *audit tenure*. Menurut Rahmi, *et al.* (2019), *audit tenure* memiliki arti sebagai seberapa lama suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) dan seorang auditor memiliki hubungan atau perikatan terhadap suatu perusahaan. Kualitas audit dipengaruhi seberapa lama seorang auditor mengaudit sebuah perusahaan. Dengan semakin lamanya masa perikatan yang terjadi, akan semakin menurunkan tingkat profesionalisme auditor. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/01 tahun 2008 mengatur tentang Jasa Akuntan Publik, bahwa untuk Kantor Akuntan Publik bisa melakukan proses audit atas laporan keuangan secara berturut-turut paling lama 6 tahun dan untuk seorang Akuntan Publik bisa melakukan proses audit atas laporan keuangan secara berturut-turut paling lama 3 tahun. Dengan adanya peraturan tersebut, memiliki tujuan untuk menjaga kualitas auditor dan membatasi hubungan auditor dengan klien agar tetap profesional.

Kualitas audit tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal. Salah satu faktornya adalah *fee* audit. Dalam penelitian ini, auditor yang memiliki kualitas yang tinggi dianggap juga akan meningkatkan *audit fee* (Andriani dan Nursiam, 2017). Auditor dapat menerima insentif mereka dengan catatan bisa mempertahankan dan menjaga kliennya agar tidak ganti auditor lainnya, karena kehilangan klien memiliki artian kehilangan *fee* audit di masa depan (Arisinta, 2013). Dengan adanya tekanan harga yang dialami auditor, memiliki risiko bahwa nantinya dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan.

Proses auditor dalam suatu perusahaan menjalankan kewajiban untuk menghasilkan kualitas audit yang maksimal tidak terlepas dari pengawasan komite audit. Fungsi dari komite audit adalah membantu fungsi dewan komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan proses pelaporan keuangan oleh manajemen perusahaan (Silfi, 2016). Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, tugas utama dari komite audit adalah sebagai pihak yang mengontrol dan memastikan tata kelola perusahaan baik, memiliki struktur pengendalian internal yang mumpuni, dan tentunya meningkatkan kualitas audit dengan menjaga keterbukaan dan transparansi dari pelaporan keuangan atas objektivitas akuntan publik. Komite audit juga digambarkan sebagai sebuah mekanisme *monitoring* dalam fungsi audit yang bisa ditingkatkan dari pelaporan eksternal perusahaan (Damayanti dan Susanto, 2015).

Penelitian dengan menggunakan variabel *audit tenure*, *audit fee*, dan efektivitas komite audit sebagai variabel independen dan penelitian mengenai kualitas audit sebagai variabel dependen pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian terdahulu dengan menggunakan variabel *Audit Tenure* dan *Audit Fee* yang dilengkapi dengan dua hasil penelitian yaitu berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dilakukan oleh Ardani (2017), Andriani dan Nursiam (2017), Rinanda dan Nurbaiti (2018), dan Hartadi (2012). Penelitian dengan variabel rotasi audit dengan hasil rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dilakukan oleh Ardani (2017), Andriani dan Nursiam (2017), dan Hartadi (2012). Penelitian dengan variabel Komite Audit memiliki hasil

berpengaruh positif terhadap kualitas audit dilakukan oleh Pertiwi *et al* (2016). Penelitian dengan variabel Efektivitas Komite audit dan Efektivitas dewan Komisaris memiliki hasil berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap kualitas laba juga pernah dilakukan oleh Hermawan (2011).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel *audit tenure*, *audit fee*, dan efektivitas komite audit sebagai variabel independen serta variabel kualitas audit sebagai variabel dependen. Berdasarkan penelitian sebelumnya, masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian mendorong peneliti untuk meneliti kembali hubungan antar variabel yang terkait.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dipahami bahwa kualitas audit adalah suatu hal yang penting untuk dijadikan pertimbangan dalam menghasilkan kualitas audit laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah efektivitas komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris mengenai

pengaruh ketiga variabel independen yakni *audit tenure*, *audit fee*, dan efektivitas komite audit terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teori berupa pertimbangan, sumbangan referensi, dan pelengkap pada peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis, yaitu pengaruh *audit tenure*, dan *audit fee* terhadap kualitas audit. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut di bidang audit.

2. Kontribusi Praktik

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktik dengan menjadikan penelitian ini sebagai media informasi dan evaluasi terkait *audit tenure*, *audit fee*, dan efektivitas komite audit yang dapat membantu para auditor, stakeholder dan manajemen perusahaan manufaktur dalam menghasilkan kualitas audit.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun bertujuan mempermudah dan memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai *grand theory* yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan mengenai variabel penelitian, sampel dan populasi, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data dengan menitikberatkan pada hasil olahan data, dan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan mengenai kesimpulan, hasil pengolahan data, keterbatasan penelitian, dan saran.

